

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Berita Kemendagri, yang ditulis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dalam pidatonya dalam acara Entry Meeting Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung Tower BPK RI Jakarta, Kamis (9/2/2023) bahwasanya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mendagri juga menyampaikan, bahwa realisasi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2022 secara nasional rata-rata sebesar 97,51% atau sebesar Rp1.165,98 triliun. Jumlah tersebut meningkat 1,35% dibandingkan tahun 2021 yang mana sebesar 96,16% atau sebesar Rp1.123,73 triliun. Tidak hanya itu pada realisasi belanja APBD Tahun 2022 secara nasional berjumlah 88,20 persen atau sebesar Rp1.156,07 triliun, nilai tersebut meningkat 2,04% dibandingkan tahun 2021 yaitu, sebesar 86,16 atau Rp1.098,29 triliun.

Melalui artikel yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada saluran Berita Kemendagri. Informasi positif lainnya adalah realisasi APBD 2022 jauh lebih baik dari tahun 2020. Realisasi pendapatan meningkat 5,03 dan realisasi belanja mengalami peningkatan 5,51 persen. Pada kesempatan lain, Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyatakan pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Lampung bahwa realisasi APBD Tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena kerja keras, kerja sama, dan kerja sama yang baik dari semua pihak. Diperolehnya angka sebesar itu bukanlah hal yang istan, tanggung jawab yang besar di pegang penuh oleh pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, serta menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu APBD harus dikelola dengan optimal mulai dari segi perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban, sehingga pembanguna daerah dapat tercapai dengan optimal.

Pada siklus anggaran, pelaksanaan anggaran merupakan tahapan terpenting. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, masih mengalami masalah dengan memenuhi anggaran pada akhir tahun. Kegiatan realisasi anggaran cenderung rendah pada semester satu, sehingga menyebabkan penumpukan pada semester kedua. Menurut (Widhianto et al., 2011), hampir setiap bulan menjelang akhir tahun anggaran, pencairan dana selalu meningkat, dengan peningkatan yang signifikan selama tiga bulan terakhir. Perekonomian secara keseluruhan akan terkena dampak negatif dari pola tersebut. Akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan (Siswanto & Rahayu 2011).

Salah satu ukuran kinerja pemerintah adalah penyerapan anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jika diserap sepenuhnya. Menurut (Fahlevi & Ananta, 2015), fenomena penyerapan anggaran besar-besaran terjadi pada akhir tahun akan mempengaruhi *output* dan *outcome* yang diharapkan dari program tersebut. Karena sejumlah masalah dari sudut pandang administrasi dan teknis, penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa biasanya lambat dan seringkali menumpuk di akhir tahun.

Meskipun penggunaan anggaran pada semester pertama sangat kecil, penggunaan pada semester kedua meningkat secara signifikan, terutama pada akhir triwulan keempat, yang menandai akhir tahun anggaran. Hal ini mengakibatkan penundaan pelaksanaan program dan inisiatif pemerintah daerah, serta dapat menyebabkan manfaat yang akan dinikmati masyarakat tertunda. Serapan dan realisasi anggaran dapat dipengaruhi oleh perencanaan saat tahun pelaksanaan dan anggaran dicairkan. Namun, ada faktor lain yang juga turut mempengaruhi serapan anggaran yang telah direncanakan, yaitu ketersediaan anggaran kas di bagian keuangan masing-masing SKPD pada saat proses pencairan, ketika program kerja yang sudah direncanakan akan dilaksanakan. Ketersediaan anggaran kas di sini lebih berkaitan dengan penjadwalan pengambilan dana.

Selain itu, meskipun ada ketersediaan kas untuk manajemen, SKPD terus mengajukan SPM (Surat Permintaan Membayar) kepada BUD pada akhir bulan semester kedua tahun tersebut. Apabila melewati batas waktu akhir tahun anggaran berjalan, kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran serta kegagalan bayar oleh BUD. Ini dapat menyebabkan serapan atau realisasi anggaran yang buruk (Mustakim et al 2023).

Strategi yang dirancang untuk optimalisasi tingkat penyerapan anggaran sangat dipengaruhi oleh faktor strategis internal dan eksternal. Berbagai metode yang digunakan untuk mencapai tujuan disebut strategi Solihin (2012). Dalam pengimplementasian strategi sangat memerlukan perencanaan strategi secara komprehensif, dengan pertimbangan faktor internal maupun eksternal yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, bahwa sangat pentingnya anggaran dan ketersediaan kas dalam suatu SKPD pada pemerintahan, peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“Pengaruh Anggaran dan Ketersediaan Kas Terhadap Realisasi Anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Lamongan”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah anggaran berpengaruh terhadap realisasi anggaran SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan ?
2. Apakah ketersediaan kas berpengaruh terhadap realisasi anggaran SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan ?
3. Apakah anggaran dan ketersediaan kas berpengaruh terhadap realisasi anggaran SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh anggaran terhadap realisasi anggaran SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan
2. Untuk menguji pengaruh ketersediaan kas terhadap realisasi anggaran SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Untuk menguji pengaruh anggaran dan ketersediaan kas terhadap realisasi anggaran SKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya terkait Pengaruh Anggaran dan Ketersediaan Kas Terhadap Realisasi Anggaran.
- b. bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang berarti untuk menambah ilmu mengenai akuntansi keuangan.
- c. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hubungan antara anggaran, ketersediaan kas, dan realisasi anggaran.

